



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

WASPADA BENCANA JELANG LEBARAN 2024

Rohani Budi Prihatin
Analisis Legislatif Ahli Madya
rohani.prihatin@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Masyarakat Indonesia diminta untuk waspada terhadap potensi bencana akibat cuaca ekstrem selama periode pancaroba pada Maret-April 2024 ini. Masyarakat perlu melakukan antisipasi dini terhadap dampak terjadinya cuaca ekstrem seperti hujan lebat dalam durasi singkat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang, angin puting beliung, serta fenomena hujan es. Khusus di wilayah dengan topografi bergunung dan tebing, masyarakat perlu mewaspadaai potensi terjadinya tanah longsor.

Menjelang Hari Raya Idul Fitri 2024, pemudik diharapkan tidak hanya berhati-hati dengan meningkatkan kewaspadaan bertransportasi selama arus mudik dan arus balik lebaran, namun juga diharapkan untuk terus memantau perkembangan info cuaca dan peringatan dini cuaca, gelombang tinggi, pasang air laut dan tsunami, serta info dini gempa bumi. Laporan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan cuaca ekstrem masih berpotensi terjadi di beberapa wilayah sepanjang masa mudik lebaran 2024, mengingat saat ini Indonesia tengah memasuki musim pancaroba yaitu peralihan dari musim hujan ke musim kemarau.

Dari sisi geografis, Indonesia dikenal memiliki risiko bencana salah satu yang tertinggi di dunia, karena terletak pada zona pertemuan lempeng besar dunia yang aktif, sehingga sering terjadi gempa bumi. Selain itu, terdapat pula bencana hidrometeorologi yang dipicu oleh perubahan iklim global yang terus membayangi, seperti banjir, longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta cuaca dan iklim ekstrem. Tercatat telah terjadi beberapa bencana alam dalam minggu terakhir ini, antara lain gempa yang berpusat di Tuban, Jawa Timur pada tanggal 22 Maret 2024. Tidak hanya itu, di Jawa Tengah sejak awal Februari 2024 sampai saat ini juga masih terjadi bencana banjir yang melanda wilayah Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Kudus, dan sebagian wilayah di Kota Semarang. Rentetan bencana ini menandakan perlunya kita membangun masyarakat sadar bencana.

Untuk mewujudkan kesadaran dan ketahanan bencana, penguatan mitigasi serta praktik-praktik penanggulangan bencana harus terus dilakukan dengan memperhatikan aspek keselamatan masyarakat dari risiko bencana. Ketahanan bencana diarahkan tidak hanya dengan memperkuat mitigasi struktural, tetapi juga mitigasi secara kultural. Mitigasi hulu ke hilir harus diperkuat untuk menekan dampak kerugian akibat kejadian bencana dan yang tidak kalah lebih penting adalah menegakkan aturan kebencanaan di wilayah berpotensi rawan bencana.

Untuk mewujudkan masyarakat sadar bencana perlu upaya kesiapsiagaan dan kewaspadaan yang menjadi kunci yang harus dipersiapkan dan dikelola dengan baik dalam upaya mitigasi bencana. Oleh karena itu, edukasi dan pelatihan kepada masyarakat menjadi langkah antisipasi yang harus menjadi prioritas. Bagaimana menyiapkan masyarakat, bagaimana mengedukasi masyarakat, bagaimana memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat untuk langkah-langkah antisipasi itu harus menjadi prioritas untuk meminimalisasi korban maupun kerugian.

Jika tidak menyiapkan masyarakat yang tangguh bencana maka korban jiwa, kerugian, dan kerusakan akibat bencana akan terus meningkat. Selain itu, proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana juga membutuhkan sumber daya yang besar, termasuk anggaran.

Pada praktiknya, ujung tombak penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah Pemerintah Daerah (Pemda). Untuk itu, Pemda perlu membangun modal sosial masyarakat untuk mendorong kemandirian dalam mengurangi risiko bencana antara lain dengan mensosialisasikan penggunaan konstruksi bangunan anti gempa kepada masyarakat. Pemerintah dan Pemda diharapkan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengurangan risiko bencana, mendorong partisipasi aktif masyarakat. Dengan melaksanakan model pembangunan berbasis risiko bencana diharapkan masyarakat memiliki kesiapsiagaan dalam pengurangan risiko bencana di wilayahnya. Dengan demikian, diharapkan akan terbangun kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan tentang kebencanaan khususnya menjelang Lebaran 2024.

Atensi DPR

Dengan adanya potensi bencana akibat cuaca ekstrem selama periode pancaroba pada bulan Maret hingga April 2024, Komisi VIII DPR RI diharapkan memberikan perhatian khusus terhadap potensi bencana tersebut menjelang arus mudik dan arus balik lebaran 2024. Melalui fungsi pengawasan, Komisi VIII DPR RI dapat mendorong Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), untuk melakukan edukasi dalam bentuk upaya pencegahan dan kesiapsiagaan guna meminimalisasi dampak ancaman bencana khususnya hidrometeorologi. Selain itu, Komisi VII DPR RI juga dapat meminta beberapa kementerian dan lembaga untuk bersama-sama mewujudkan warga negara Indonesia menjadi masyarakat yang sadar bencana pada setiap situasi, khususnya menjelang lebaran 2024 saat ini.

Sumber

antaranews, 30 Maret 2024;
bmg.go.id, 26 Maret 2024;
cnnindonesia.com, 27 Maret 2024;
detik.com, 26 Maret 2024;
kompas.com, 30 Maret 2024.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

Polhukam

Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman

Ekkuinbang

Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Nidya W. Sayekti
Monika Suhayati

Kesra

Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

EDITOR

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

©PusakaBK2024